Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 6, No. 1, June 2021, 1-7 p-ISSN 2541-7150 | e-ISSN 2776-7019



Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Ismiyati^{1*}, dan Anggita Nurcahyani ²

¹ Yayasan Abulyatama, Indonesia ²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia E-mail: Ismiyatianninda@gmail.com

ABSTRACT

The development of the Human Development Index (IPM) in Banten has increased every year. However, the progress is quite slow. The purpose of this study was to analyze the effect of government spending on education, poverty, and GRDP on the human development index of Banten. Sources of data in this study came from BPS Banten Province and the regional education balance Ministry of Education and Culture (KEMENDIKBUD). The sample in this study is data on government spending on education, poverty, regional gross domestic product and human development index in 4 districts and 4 cities in Banten 2015-2019. In this study used a saturated sample. The results show that partially the education budget variable has no significant effect on the Human Development Index, which means that an increase in the education budget each year does not significantly affect IPM. Poverty has a negative and significant effect on IPM in Banten, so decreasing poverty levels will increase IPM in Banten, and GRDP has an insignificant positive effect on IPM, which means that an increase in GRDP every year does not significantly affect IPM in Banten. Simultaneously, the variables of government expenditure on education, poverty, and GRDP have a significant effect on IPM in Banten.

Keywords: Human Development Index (IPM), Government Spending on Education, Poverty, and GRDP

Pendahuluan

Pembangunan sebagai upaya mencapai tujuan bangsa. Pertumbuhan indikator yang digunakan sebagai keberhasilan pembangunan. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara (Ibrahim, 2016).

Meningkatnya angka kesejahteraan merupakan tujuan bagi setiap pemerintah daerah. Umat islam diajarkan mengenai kemanusiaan, dimana terdapat larangan meninggalkan keturunan yang masih0020szacvflemah. Surat an-Nisa ayat 9 yang artinya:

"Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkandibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan "Human Development Index (HDI)" atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM ada kesehatan, pendidikan dan akses sumber daya ekonomi.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Banten dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperi tabel di bawah ini:

Tabel 1 IPM Provinsi Banten Tahun 2015-2019

| Wilayah | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Provinsi Banten | 70.27 | 70.96 | 71.42 | 71.95 | 72.44 |

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya, dari tahun ke tahun terus meningkatkan investasinya di bidang pendidikan. Setiap provinsi khususnya di Banten selalu memandang bahwa aspek penting pembangunan yaitu berasal dari pendidikan. Ketentuan yang tertuang dalam APBD mengenai anggaran pendidikan merupakan salah satu komitmen pemerintah terhadap pentingnya pembangunan pendidikan

Keadaan rumah tangga memiliki peran yang krusial terhadap kontribusi pembangunan manusia, misalnya meliputi makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga biasanya dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh. Kemiskinan bisa membuahkan pengaruh yg relatif berfokus bagi pembangunan insan lantaran perkara kemiskinan adalah hal yanag kompleks yang bermula berdasarkan ketidakmampuan warga unuk memenuhi kebutuhan utama sebagai akibatnya kebutuhan yg lain misalnya pendidikan & kesehatan pun terabaikan.

Dilihat dari sisi perekonomian, memberikan hasil bahwa sumber daya manusia kurang berkualitas dengan tingkat produktifitas yang rendah. Pengaruh ini memberikan dampak terbatas peroleh upah/pendapatan. Perkembangannya memberikan pengaruh bagi pembangunan manusia.

Proses produksi barang dan jasa nasional dapat dilihat dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan atau penurunan produk domestik bruto menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi tercermin dari perubahan produk domestik bruto per periode sebagai indikator perkembangan dan keberhasilan implementasi kebijakan secara langsung dan tidak langsung.

Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.6, No. 1 |1-7 p-ISSN 2541-7150 | e-ISSN 2776-7019

Tinjauan Pustaka

Kebijakan fiskal salah satunya yaitu pengeluaran pemerintah mengenai berapa banyak yang diterima dan dikeluarkan pemerintah setiap tahun dan didokumentasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) sebagai tindakan mengatur arus perekonomian. Kebijakan ini bertujuan menstabilkan harga, tingkat output yang dicapai, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia melalui penyediaan layanan dasar memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas SDM. Sebagai warga negara, maka berhak menerima jaminan dan perlindungan dari pemerintah, seperti menerima pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan untuk mewujudkan hak. Semua pelayanan tersebut dapat mempengaruhi pembangunan manusia. (Mongan, 2019).

Pengeluaran di bidang pendidikan oleh pemerintah merupakan suatu hal yang fundamental & sangat penting pada pembangunan. Pendidikan adalah suatu hal yang krusial buat mencapai sautu peradaban yg lebih maju menggunakan menaikkan kapabilitas tersebut. Pendidikan adalah investasi yg sangat krusial pada menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga bisa diukur menurut faktor kemiskinan. Kemiskinan diartikan menjadi kurangnya pendapatan buat memenuhi kebutuhan hayati utama atau dasar. Mereka yang pada katakan berada pada garis kemiskinan bila tidak buat memenuhi kebutuhan pokok (Josep, 2018).

Menurut Word Bank terdapat tiga faktor utama penyebab kemiskinan, meliputi rendahnya pendapatan dan asset, memiliki ketidakmampuan bersuara, ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan rentan terhadap guncangan ekonomi karena tidak dapat menangulanginya (Josep, 2018).

Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah, biasanya dijadikan sebagai indikator kunci untuk menentukan kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu (Manggala, 2019). Pada dasarnya PDRB atas dasar harga konstan berisi nilai tambah barang dan jasa dan dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar nilai layanan. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menentukan sumber daya ekonomi, perpindahan, dan struktur ekonomi sumber daya ekonomi suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana orang mengakses hasil pembangunan yang terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (BPS, 2020). Dapat disimpullkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan metode yg dilakukan dalam mengukur tingkat pencapaian pembangunan, sehingga mampu mengkategorikan sebuah negara yang tergolong negara maju atau negara berkembang.

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan ukuran kebahagiaan masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya duniawi, tetapi juga di akhirat. Bagi manusia untuk meraih kemakmuran dunia dan ayat 9 akhirat adalah bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT, Dia akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan amal dan usahanya. Maka dalam hal ini pemerintah selaku Uluru Amri bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. (Ningrum et al., 2020).

Metode

Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Banten. Variabel yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1), Kemiskinan (X2), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun untuk objek penelitian dilakukan di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Banten yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang dengan tahun pengamatan selama 2015- 2019. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews 9.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Statistik Deskriptif

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) sebagai variabel X1memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4.17E+08 Milyar dan nilai maksimum sebesar Rp. 2.32E+09 Milyar. Adapun nilai rata -rata sebesar Rp. 1.16E+09 Milyar dan standar deviasi sebesar Rp. 4.89E+08 Milyar.

Kemiskinan sebagai variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar -1.516150% dan maksimum sebesar 78 1.941892%. Lalu nilai rata-rata sebesar 2.50E-11% dan standar deviasi sebesar 1.000000%.

PDRB sebagai variabel X3 memiliki nilai minimum Rp. 2208098 Juta dan maksimum sebesar Rp. 44169193 Juta. Adapun mendapatkan nilai rata – rata sebesar Rp. 19941297 Juta dan standar deviasi sebesar Rp. 12468571 Juta.

IPM sebagai variabel Y memiliki nilai minimum 22.31118 % dan maksimum sebesar 29.98914 %. Memperoleh nilai rata – rata sebesar 25.69955% dan standar deviasi sebesar Rp. 12468571 Juta.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Output pada uji normalitas diperoleh nilai prob. 0.129209 >5%. Artinya data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji yang dilakukan, tidak ada nilai korelasi yang tinggi. Nilai antar variabel bebas tidak melebihi 0,9. Maka dapat disimpulkan pada model tersebut tidak terdapat Multikolineritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW terletak antara (dU dan 4-dU) yakni $1,6505 \le 2,31328 \ge 2,3495$, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka (terima dan tolak) yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Heterokedastisitas

Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (T)

Nilai t-hitung pada PPBP (X1) sebesar 1.104512 dengan probabilitas 0.2767 hasil tersebut menunjukan probabilitas > 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan PPBP terhadap IPM.

Nilai t-hitung pada Kemiskinan (X2) sebesar -7.112644 dengan probabilitas 0.0000 hasil tersebut menunjukan probabilitas < 0,05. Berarti terdapat pengaruh signifikan Kemiskinan terhadap IPM.

Nilai t-hitung pada PDRB (X3) sebesar 0.324249 dengan probabilitas 0.7476 hasil tersebut menunjukan probabilitas > 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap IPM.

Uji Simultan (F)

Melalui uji simultan menghasilkan F hitung = 27.39310 dengan probabilitas 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukan probabilitas < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan PPBP, Kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Banten.

Uji Koefisien Determinasi

Diperoleh nilai sebesar 0,669993, hal ini berarti Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDRB mempenggaruhi IPM hanya (66,9%) saja. Sisanya sebesar 34,1% dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain di luar variabel yang tidak dihitung pada penelitian ini.

Pembahasan

Dampak Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (PPBP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai sebesar 0,000000000721 menunjukkan bahwa PPBP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM di Banten. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 1 poin meningkatkan IPM sebesar 0,00000000721, yang tidak signifikan.

Sesuai dengan penelitian Pake et al (2018) yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara. Hasilnya diperoleh PPBP memilik tanda positif namun kurang berpengeruh secara signifikan terhadap IPM.

Pemerintah Banten terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan. Peningkatan IPM tentunya memerlukan tindakan kebijakan untuk lebih meningkatkan anggaran pendidikan.

Dampak kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ini memberikan skor kemiskinan -1,800426. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM di Banten. Sebab, kenaikan kemiskinan 1 poin menurunkan IPM sebesar 1,800426.

Hasil tersebut sama dengan kajian yang dilakukan Faradiba et al (2018). Hasil penelitian diperoleh Kemiskinan berpengaruh signifikan dan memiliki koefesien negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai PDRB sebanyak 0.00000000923 mengindikasi bahwa PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM Provinis Banten. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan dalam PDRB sebanyak 1 poin maka akan mempertinggi IPM sebanyak 0.00000000923 meskipun nir signifikan.

Hal ini karena PDRB menghitung semua nilai tambah yang dihasilkan secara regional tanpa mempertimbangkan apakah nilai tambah tersebut penduduk atau tidak. Selain itu, karena PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk, terdapat ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk.

Dampak pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kemiskinan dan PDRB secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan perhitungan regresi panel terlihat bahwa hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai F hitung = 27,39310 dengan probabilitas 0,0000. Oleh karena itu, bersama-sama terdapat dampak yang signifikan antara pendidikan negara, kemiskinan dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten.

Kesimpulan

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perubahan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Banten.

Kemiskinan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Setiap kemiskinan meningkat, indeks pembangunan manusia Banten turun.

PDRB tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten. Artinya, besaran PDRB tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Banten.

Referensi

- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*. https://www.bps.go.id/subject/26/indekspembangunan-manusia.html,
- Faradiba, A. O., Fathoerrazi, M., & S, R. P. (2018). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Journal Ekuilibrium*, *I*(1), 7–13.
- Ibrahim, Z. (2016). Pengantar Ekonomi Makro. Koperasi Syariah Baraka.
- Josep. (2018). Konsep dan Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Indocamp.
- Manggala, G. D. (2019). Pengaruh Dana Desa (Dd) Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, *1*(1).
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi*, 18(04), 13–22.